



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



SEKRETARIAT DPRD KAB. KEP SELAYAR

Jl. Jend Ahmad Yani No. 1, Benteng
Telp. (0414) 21714 No. Faks. (0414) 21097
Kab. Kepulauan Selayar 92812

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat terselesaikan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar baik yang telah berhasil mencapai target kinerja sesuai yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja maupun yang belum mencapai target.

Kami berharap Laporan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar

Drs. Ahmad Yani

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 196703121992031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD	2
D. Isu-Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	9
B. Indikator Kinerja Utama.....	14
C. Rencana Kinerja Tahunan	15
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. Pengukuran Kinerja.....	28
B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.....	32
C. Realisasi Keuangan	49
BAB IV PENUTUP.....	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan.....	5
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD 2021-2026	13
Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	13
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD	14
Tabel 2.4 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	16
Tabel 2.5 Rencana Kinerja Tahunan Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.....	17
Tabel 2.6 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	25
Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Sebelum Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.	26
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	31
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2024 Per Triwulan	32
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya dan Periode Akhir Renstra	34
Tabel 3.4 Target dan Realisasi kinerja sasaran 1 tahun 2024	34
Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan Pendukung Sasaran 1	35
Tabel 3.6 Target dan Realisasi kinerja sasaran 2 tahun 2024	40
Tabel 3.7 Penyelarasan / Pengintegrasian Program Kerja DPRD Ke dalam Dokumen Perencanaan Sekretariat DPRD TA 2024	40
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1	45
Tabel 3.9 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1 Per bulan.....	49
Tabel 3.10 Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019-2024	48
Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran TA 2024 Menurut Program, dan Sub Kegiatan Tahun 2024	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	3
Gambar 2.1 Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar.....	12

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 memiliki 2 sasaran strategis yaitu:
 1. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dengan dua Indikator yakni indikator nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 yakni predikat CC (58,50) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP, indikator kedua yakni Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah telah sesuai SAP dan mencapai target;
 2. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan dua indikator yakni Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 100% telah memenuhi target dengan kriteria realisasi sangat tinggi dan menghasilkan 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan T.A. 2024. Indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 88 dengan persentase capaian 117% dengan kategori sangat tinggi,
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 29.297.518.167 atau 98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 461.451.333 atau 2%.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai UU Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom diberikan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai upaya pencegahan terhadap bias-bias penyalahgunaan kewenangan pada otonomi daerah, pemberian kewenangan harus dijalankan dengan peningkatan akuntabilitas. Selain itu, sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pemerintahan perlu untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, legitimate dan akuntabel,

Untuk mewujudkan adanya pertanggungjawaban dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi (*good governance*) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan atau kegagalan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam program/kegiatan yang telah direncanakan pada suatu Tahun Anggaran.

Penyusunan LAKIP diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tata cara Review atas Lakip Intansi. Sesuai dengan penjelasan kebutuhan akan pertanggungjawaban akuntabilitas dan amanat dari peraturan di atas maka Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyusun Lakip sebagai transparansi informasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

B. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa tujuan pelaporan kinerja adalah :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

Maksud dari penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Selayar secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat),

Tujuan dari penyusunan LAKIP adalah :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang dan merupakan media dalam upaya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

C. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan dalam hal administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Berdasarkan Rencana Srategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021 – 2026, Sekretariat DPRD sesuai perda No. 4 tahun 2020, mempunyai tugas dan fungsi “*Sebagai Unsur Pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.*”

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD dibantu oleh pejabat struktural eselon III, yaitu Kepala Bagian, dan eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian, dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

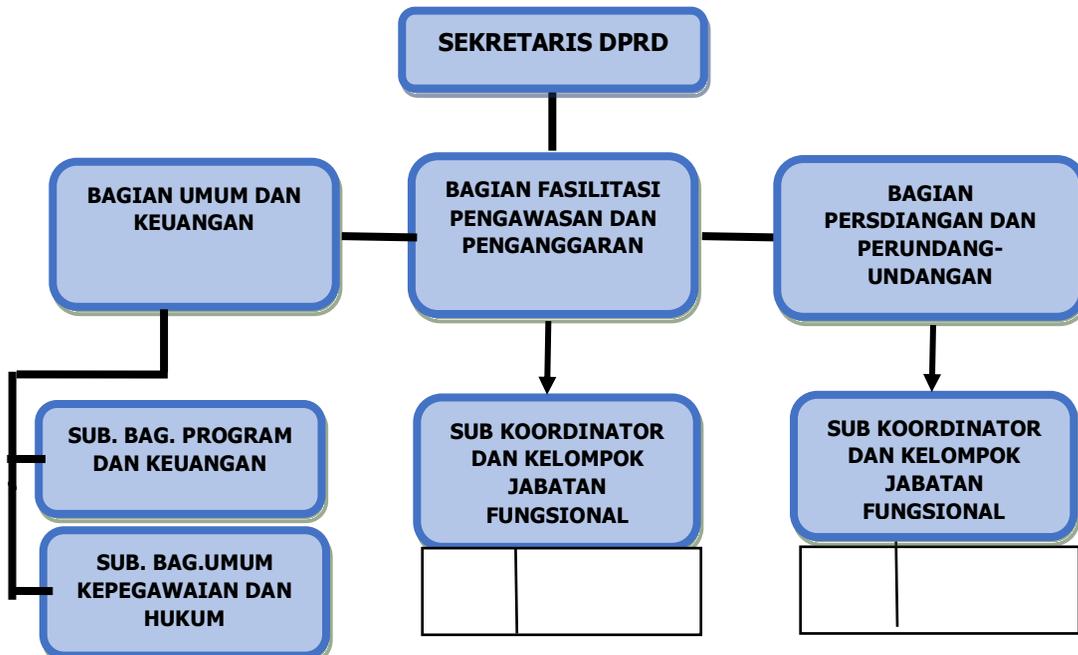
1. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang membawahi tiga bagian, yakni:

- a. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :
 - Sub. Bagian Program dan Keuangan;
 - Sub. Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum.
- b. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan terdiri dari :
Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2024

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 120 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, “*Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD*”. Dalam menyelenggarakan tugas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;

a. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan serta pemberian dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Sekretariat DPRD dan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Penyelenggaraan administrasi keuangan Sekretariat DPRD dan administrasi keuangan DPRD;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang legislasi;
- Penyelenggaraan dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Penganggaran dan pengawasan; dan
- Pelaksanaan tugas fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan Fungsinya.

b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan

Bagian umum dan keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam mengkoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD. Bagian Umum dan Keuangan terdiri dari :

- Sub bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dan Keuangan dalam memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD;
- Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset, pengelolaan kepegawaian dan perundang-undangan.

c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam menyelenggarakan Fungsi dukungan penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPRD di bidang penganggaran dan pengawasan.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komposisi Sumber Daya Aparatur

Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar **per 31 Desember 2024** didukung oleh sumber daya aparatur ASN sebanyak 26 (dua puluh enam orang). Berikut kualifikasi jabatan Pegawai lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Jabatan

No	Jabatan	Formasi	Pegawai Yang Ada	Kekurangan
A	Jabatan Struktural			
1.	Sekretaris DPRD	1	1	0
2.	Kabag Umum dan Keuangan	1	1	0
3.	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	1	1	0
4.	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	1	1	0
5.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	1	0
6.	Kasubbag Program dan Keuangan	1	1	0
B.	Jabatan Fungsional Tertentu			
1.	Perisalah Legislatif Ahli Muda	3	3	0
3.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	1	2

C.	Jabatan Pelaksana			
1.	Penelaah Teknis Kebijakan	12	6	6
2.	Pengadministrasi Perkantoran	6	6	0
3.	Penata Layanan Operasional	4	4	0
Jumlah		34	26	8

Sumber : Data Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2024

Sumber Daya Aparatur adalah salah-satu faktor yang menunjang kinerja suatu instansi. Dari Tabel 1.1. di atas dapat dilihat bahwa dari 34 formasi yang dibutuhkan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar yang terpenuhi hanya 26 Pegawai, masih terdapat 8 kekurangan pegawai dengan spesifikasi jabatan yang berbeda-beda. Adanya kekurangan sumber daya pada Sekretariat DPRD mengakibatkan *job desk* dari suatu jabatan dikerjakan oleh pihak yang bukan pada bidangnya sehingga selain beban kerja yang tumpang tindih, kualitas dari *output* yang dihasilkan juga masih rendah. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja adalah dengan memenuhi formasi yang dibutuhkan oleh Sekretariat DPRD.

4. Keadaan Sarana dan Prasarana

a. Bangunan Gedung

Sekretariat DPRD berlokasi di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. Gedung Sekretariat DPRD dengan luas bangunan ±940 m², terdiri dari 5 gedung yakni:

1. Tiga gedung operasional kantor yang terdiri dari 1 gedung tempat Ibadah, dan 1 gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar. Adapun rinciannya sebagai berikut:
 - Gedung A terdiri dari 2 lantai;
 - Gedung B terdiri dari 3 lantai;
 - Gedung C terdiri dari dua lantai.
2. Satu gedung tempat ibadah. Keadaan gedung tempat ibadah Sekretariat DPRD atau musholla saat ini mengalami kerusakan pada bagian atap, hal ini disebabkan selain dari pada gedung yang telah ada sejak lama, juga disebabkan oleh faktor cuaca yang mempengaruhi kerusakan dari atap bangunan mushola.
3. Satu gedung Rumah Jabatan Ketua DPRD Kab.Kep. Selayar.

b. Sarana Transportasi, Informasi dan Komunikasi

a. Sarana Transportasi

Kendaraan bermotor operasional di Sekretariat DPRD per 31 Desember 2024 terdiri atas Kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat, serta kendaraan roda empat jabatan bagi pimpinan DPRD :

Kendaraan roda empat Pimpinan DPRD	: 3 unit
Kendaraan roda empat Sekretariat DPRD	: 2 unit
Kendaraan roda 2	: 34 unit

b. Sarana Pendukung Lainnya

Sarana pendukung lainnya yang tersedia antara lain Wifi/Jaringan Internet, CCTV, Laptop, komputer, Printer, LCD, Sound, AC , Kulkas dan sarana pendukung lainnya yang menunjang kinerja dari Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD.

Sarana dan Prasarana pada Sekretariat secara umum telah mencukupi namun masih perlu untuk ditingkatkan dalam hal pemeliharaan kualitas ataupun beberapa sarana yang sudah mencapai masa penggantian, dipandang perlu untuk segera diganti dengan yang baru untuk meningkatkan daya dukung bagi fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD

D. Isu-Isu Strategis

Sekretariat DPRD memiliki dua tanggung jawab yakni secara administratif dan operasional. Secara administratif Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, dan secara operasional Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD. Sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD perlu untuk menyeimbangkan kedua tanggung jawab tersebut dengan berbagai faktor eksternal dan internal yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Sebagai lembaga birokrasi, Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan kepada DPRD dituntut untuk tidak terlibat dalam politik praktis dan harus memiliki mentalitas kuat dan kemampuan untuk mengakomodir kepentingan dalam mendukung kinerja DPRD.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut kemudian dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Sehingga diperlukan kemampuan untuk mengenali serta merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu-isu Strategis ditetapkan melalui analisa lingkungan kerja berupa faktor

eksternal dan internal untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensialnya yang dilanjutkan dengan penentuan skala prioritas. Adapun yang menjadi isu-isu strategis di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, meliputi:

- Keterbatasan Sumber Daya Aparatur dalam hal kuantitas dalam meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD;
- Dinamika politik mempengaruhi kinerja sehingga menuntut mentalitas yang kuat dalam mengakomodir berbagai kepentingan semua pihak;
- Kualitas dari Sumber Daya Aparatur masih rendah dalam hal kesadaran akan tanggung jawab dan disiplin kerja, terdapat beberapa aparat yang masih lalai terhadap tanggung jawabnya dan memberikan beban kerja kepada pihak lain;
- Keterbatasan anggaran dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana dengan kualitas yang baik dan maksimal.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, Rencana Strategis Sekretariat DPRD dirumuskan dan ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dari perencanaan sebelumnya dan melakukan pembaharuan/perubahan apabila terdapat hal yang perlu untuk diperbaharui mengikuti ketentuan dan peraturan terbaru.

Pada Tahun 2021 telah ditetapkan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, kemudian dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah menjadi dasar dilaksanakannya koordinasi, konsultasi dan asistensi dalam melakukan perubahan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dari hasil konsultasi terkait Perubahan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang memuat Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Adapun yang termuat dalam Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi pembangunan daerah adalah visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, yang merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih sebagai substansi dan rujukan utama penyusunan RPJMD dan demi mendapatkan perencanaan yang baik, dapat dikelola, selaras dengan manajemen pemerintah daerah, maka visi dan misi tersebut perlu dikembangkan dan dijabarkan sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, agar tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun dapat dijabarkan secara efektif dalam mencapai tujuan utama pembangunan daerah.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan yang potensial dihadapi pada periode 2021 - 2026, dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024 , Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat dan Mandiri, RPJMD 2016-2021, Revisi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018 – 2023 , dan RPJPD Kab Kepulauan Selayar 2005 – 2025 adalah Selayar sebagai Kabupaten Maritim Terdepan, Mapan, mandiri dan berkelanjutan maka Visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah :

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”.

Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki Kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar muat barang, serta perdagangan industri. Indikator yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJMD dengan Visi Bandar maritim adalah:

1. Kepulauan Selayar sebagai simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan Sumber Daya alam yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar sebagai penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan serta menjadi penyedia ekspor perikanan dan non perikanan;
4. Peningkatan pelayanan , pemberdayaan masyarakat dan daya saing daerah.

Bandar maritim didukung:

- 1) Kawasan Distribusi Logistik;
- 2) Kawasan Ekonomi Khusus;
- 3) Kawasan Industri Perikanan Terpadu.

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021–2026:

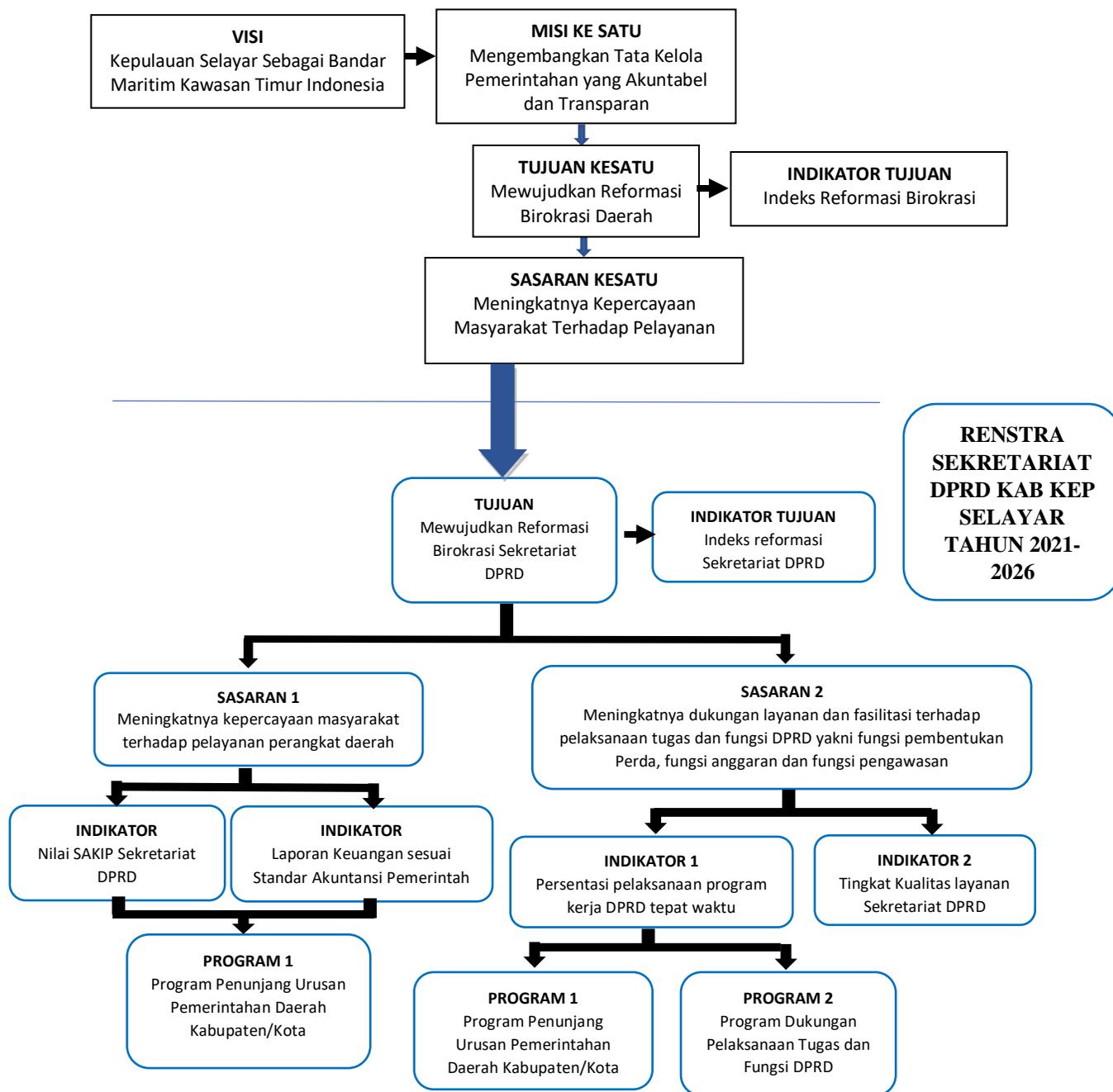
- 1) Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan;
- 2) Meningkatkan Kualitas Pembangunan Pedesaan;
- 3) Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat;
- 4) Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan (Kemaritiman);
- 5) Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan;
- 6) Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 serta berdasarkan tugas pokok fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam Renstra mendukung pencapaian Misi Kepala Daerah yaitu pada misi Ke-1 : “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan”.

Berikut cascading Sekretariat DPRD :

Gambar 2.1

**Cascading Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
RPJMD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021-2026**



2. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Cascading Kinerja, Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mendukung Tujuan Kesatu (T1), Sasaran kesatu (S1) dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran pada Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 5 (lima) tahun ke depan adalah :

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Tujuan /Indikator Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Sekretariat DPRD		Indeks reformasi Sekretariat DPRD	33,89 (C)	55,00 (CC)	64,00 (CC)	68,00 (B)	73,00 (B)	76,00 (A)
	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD		B(60)	B(65)	BB(70)	BB(75)	(A)80
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah		Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu		100	100	100	100	100
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD		65	70	75	80	85

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar 2021-2026

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan perangkat daerah. Strategi dimaksud dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program dan kegiatan.

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN STRATEGIS	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatkan kapabilitas dan keunggulan SDM yang ditunjang perangkat teknologi informasi	1. Peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur 2. Peningkatan sarana prasarana 3. Peningkatan kualitas SDM
	Meningkatkan kualitas perencanaan yang berorientasi hasil	

	Meningkatkan pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku	
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	1. Peningkatan dukungan fasilitasi administrasi keuangan, persidangan, dan penyediaan tenaga ahli 2. Peningkatan system/digitalisasi program kegiatan

Sumber : Renstra Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik pada tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD berdasarkan hasil Renstra Perubahan pada tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3

Indikator Kinerja Utama Perubahan Sekretariat DPRD

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	
				ALASAN FORMULASI/RUMUS HITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Skala Nilai	Hasil Penilaian Inspektorat	Inspektorat
2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	%	Jumlah program kerja yang di rencanakan dan jumlah yang terealisasi tepat waktu	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar

	yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Skala Nilai	Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep Selayar	Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar
--	-----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------	-------------------------------------------	------------------------------------

Sumber : Rencana Strategis Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2021-2026

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan anggaran dan membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah. Target kinerja sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan menjadi pertimbangan dan penentu pada saat pengalokasian anggaran. Indikator Kinerja ditentukan dengan berorientasi pada *output* dan *outcome* yang dihasilkan sehingga pada target kinerja dapat diperoleh ukuran keberhasilan dari suatu program, kegiatan ataupun sub kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) T.A, 2024 tercantum sebagai berikut :

Tabel 2.4

**Rencana Kinerja Tahunan
Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B(70)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya capaian kinerja Sekretariat DPRD	Persentase capaian Kinerja Sekretariat DPRD	100%
2	Meningkatnya pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai		Meningkatnya capaian pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD	100%
					Meningkatnya Dukungan Pelayanan Administrasi dan Fasilitasi terhadap Tugas DPRD	Persentase capaian Dukungan Pelayanan Administrasi	100%

3	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas dukungan pelayanan terhadap peningkatan kapasitas DPRD dan fungsi pembentukan perda DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam hal pembentukan Perda dan peningkatan kapasitas Lembaga DPRD	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	75		Meningkatnya Kualitas dukungan pelayanan pelaksanaan tugas fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD	Rata rata Persentase keterpenuhan atas layanan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam fungsi anggaran dan pengawasan	100%

Sumber : Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2024

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan TA 2024
Setelah Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar
Tahun 2021-2026

NO	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis			Program				Kegiatan/ Sub Kegiatan				19
			Uraian	Indikator Kinerja	Target	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	Uraian	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Anggaran (Rp)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Mewujudkan reformasi birokrasi Sekretaraiaat DPRD	Indeks reformasi secretariat DPRD			68,00 (B)	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase keterpenuhan capaian kinerja dan keuangan	100%	17.085.322.700	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	80.599.600	SUHERTINA, ST
			Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	BB (70)		Persentase keterpenuhan sarana dan prasarana aparatur yang memadai (dalam kondisi baik)	100%		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5 Dok	22.349.600	
				Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai		Persentase kelancaran admnistrasi, keuangan dan operasional perkantoran	100%		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	9.710.000	

										Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8 Paket	666.000.000	
			Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Program Kerja DPRD Tersusun dan Terintegrasi Dokumen Rencana Tahunan (RKPD) dan dokumen penganggaran setwan	100%	12.681.103.300	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	2.535.657.000	ANDI JALALUDDIN AMAR, SH
				Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	75		Rata-rata Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Pelaksanaan Tugas Anggota DPRD dalam Fungsi Pengawasan, Penganggaran dan Pembentukan Perda	100%		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dok	122.155.000	
										Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30 Dok	2.413.502.000	
										Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	677.993.000	MOHAMMAD BASIR, SH
										Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10 Dok	25.000.300	

										Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	81.588.000	MOHAMMAD BASIR, SH
										Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5 Lap	81.588.000	
										Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	6.139.071.400	Hj. RISMALA DEWI, SE
										Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33 Dok	4.224.970.100	
										Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10 Dok	194.779.000	
										Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	53 Dok	1.719.322.300	

Adapun yang menjadi struktur program dan kegiatan yang berkaitan dan menjadi pendukung tercapainya target Kinerja Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2024 sebagaimana berikut.

Tabel 2.6
Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.085.322.700
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.599.600
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.349.600
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	9.710.000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	7.480.000
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	4.030.000
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.030.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.425.300
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.100.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.152.300
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.138.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.400.000
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	16.998.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.636.800
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.809.200
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	383.809.200
Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.909.300
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.310.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.010.300
Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.190.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.399.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.338.700
Pengadaan Mebel	170.056.500
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.282.200
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.833.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.610.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.223.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.138.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.264.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.652.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.310.000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	339.912.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.114.953.300
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.950.957.100
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.163.996.200
Layanan Administrasi DPRD	754.316.300
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	72.045.800
Fasilitasi Fraksi DPRD	5.025.000
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.245.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	666.000.000
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	12.681.103.300
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.535.657.000
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	122.155.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.413.502.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran	677.993.000
Pembahasan KUA dan PPAS	25.000.300
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	14.986.200
Pembahasan APBD	248.256.800
Pembahasan APBD Perubahan	208.624.200
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	181.125.500
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	553.231.400
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	140.145.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	166.095.400
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	66.550.600
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	58.351.700
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	74.998.900
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	32.309.100
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.680.000
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12.100.000
Peningkatan Kapasitas DPRD	1.036.512.500
Orientasi DPRD	589.512.500
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	217.500.000
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	49.500.000
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.657.050.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	222.000.000
Pelaksanaan Reses	1.435.050.000
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	81.588.000
Pengawasan Kode Etik DPRD	81.588.000
Fasilitasi Tugas DPRD	6.139.071.400
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.224.970.100
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	194.779.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.719.322.300
TOTAL ANGGARAN	29.766.426.000

Sumber : DPAP Sekretariat DPRD Kab Kep Selayar Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan PERMENPAN No. 53 tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah

komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur, berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar TA. 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	B(70)
		Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah	Sesuai
2.	Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	Persentasi pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	100%
		Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	75

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Kep. Selayar Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah merupakan proses pengumpulan data , analisis, dan / atau pelaporan informasi mengenai kinerja dari seorang individu atau organisasi. Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengetahui hasil / *outcome* yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kinerja pada Sekretariat DPRD didasarkan pada indikator dan target kinerja yang telah tertuang dalam rencana kinerja tahunan dan dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berupa excel via grup *WhatsApp* dan website Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Website Manca yang diatur oleh Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar :

1. Pengukuran Kinerja oleh Penanggung Jawab Sub Kegiatan/Kegiatan

Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan membagikan Form Pengukuran Kinerja ke masing-masing Penanggung jawab Sub Kegiatan/Kegiatan berdasarkan program/kegiatan/sub kegiatan yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 melalui media komunikasi berbasis *online via whatsapp* dengan format excel yang hasil tiap bulannya dilaporkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk dokumen dan salinannya diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan. Pengukuran Kinerja ini dilakukan secara berkala yaitu Bulanan / Triwulanan / dan Semester. Data Capaian Kinerja disusun berdasarkan hasil dari Form Pengukuran Kinerja oleh penanggung jawab masing-masing yang diserahkan kepada Sub Bagian Program dan Keuangan untuk diolah kembali dan beberapa dokumen pendukung pengukuran kinerja baik dari Inspektorat maupun Sekretariat DPRD sendiri. Pada data capaian kinerja tidak hanya melaporkan terkait kinerja program / kegiatan / sub kegiatan tetapi juga melaporkan pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar tiap Bulan/Triwulan/Semester.

Berbeda dengan perhitungan pengukuran kinerja yang hanya merupakan hasil dari bulan tersebut, pada data capaian kinerja merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya dan bulan tersebut. Contoh perhitungan

Capaian Kinerja bulan Maret = R.Kinerja Januari+R. Kinerja Februari+R Kinerja Maret

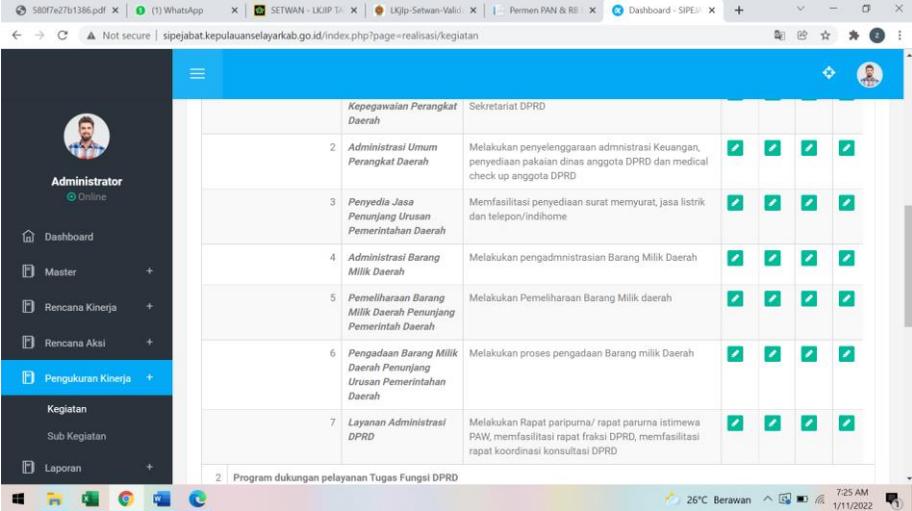
Data Capaian Kinerja ini kemudian menjadi bahan pada Evaluasi Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Adapun Hasil Form Pengukuran Kinerja Bulanan /Triwulanan/Semesteran dan Data Capaian Kinerja Bulanan/Triwulanan/Semesteran (terlampir).

2. Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pengukuran Kinerja

a. SIPEJABAT

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Sekretariat DPRD adalah aplikasi SIPEJABAT link : <http://sipejabat.kepulauanselayarkab.go.id/login.php> yang mengintegrasikan Rencana Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran Kinerja capaian kinerja triwulanan.

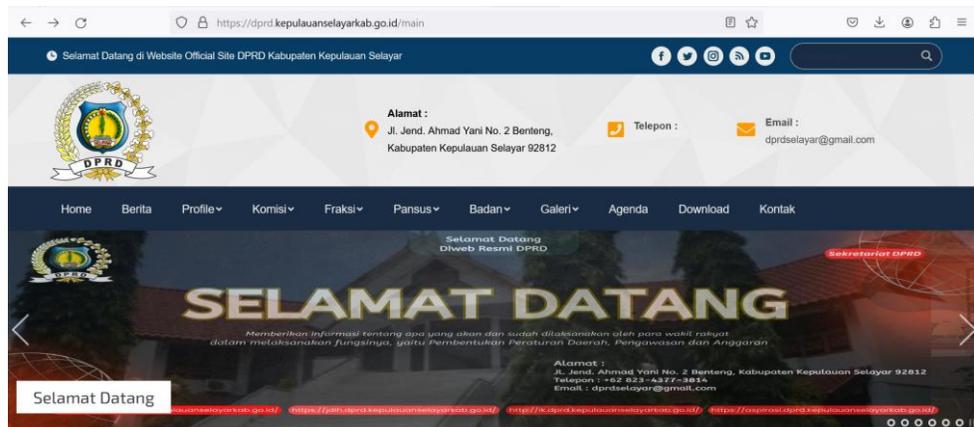


The screenshot shows the SIPEJABAT web application interface. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Master, Rencana Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja (highlighted), Kegiatan, Sub Kegiatan, and Laporan. The main content area displays a table with performance data for the DPRD Secretariat. The table has columns for activity name, description, and four status indicators (green checkmarks). Below the table, there is a note: '2 Program dukungan pelayanan Tugas Fungsi DPRD'.

Kepegawaian Perangkat Daerah		Sekretariat DPRD				
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melakukan penyelenggaraan administrasi Keuangan, penyediaan pakaian dinas anggota DPRD dan medical check up anggota DPRD	✓	✓	✓	✓
3	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Memfasilitasi penyediaan surat menyurat, jasa listrik dan telepon/indihome	✓	✓	✓	✓
4	Administrasi Barang Milik Daerah	Melakukan pengadministrasian Barang Milik Daerah	✓	✓	✓	✓
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Melakukan Pemeliharaan Barang Milik daerah	✓	✓	✓	✓
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melakukan proses pengadaan Barang milik Daerah	✓	✓	✓	✓
7	Layanan Administrasi DPRD	Melakukan Rapat paripurna/ rapat parurna istimewa PAW, memfasilitasi rapat fraksi DPRD, memfasilitasi rapat koordinasi konsultasi DPRD	✓	✓	✓	✓

b. Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bertujuan untuk menyajikan informasi seputar DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, terkait profil Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dan agenda yang akan dan telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar dalam melaksanakan fungsinya, yaitu Pembentukan Peraturan Daerah, Pengawasan dan Anggaran. Adapun Website Official Site DPRD dapat diakses dengan link : <https://dprd.kepulauanselayarkab.go.id/main> .



Tidak hanya menyajikan informasi, Website Official Site DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar juga menyediakan wadah bagi masyarakat untuk lebih dekat dengan Sekretariat DPRD dan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya “*LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat*” yang terdiri dari empat (4) link;



- Survei Kepuasan Layanan untuk mengukur indikator Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD. Survei ini dinilai oleh 25 Anggota DPRD terkait penilaian pelayanan yang telah diberikan oleh Sekretariat DPRD. Survei dapat diakses dengan link : <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, E-survey ini telah mengacu kepada permenpan No. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



- Jaringan Dokumentasi Hukum, menyajikan informasi produk hukum yang telah dihasilkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun Jaringan Dokumentasi Hukum dapat diakses dengan link : <https://jdih.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/produk/jenis/keputusan-dprd> .
- Sistem Administrasi dan Informasi Rapat (SAIR), menyajikan informasi terkait agenda yang akan dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar. SAIR dapat diakses dengan link : <https://agenda.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/login.php> .
- SAPA Online Aspirasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan wadah yang dapat menampung aspirasi masyarakat agar mempermudah masyarakat untuk menyampaikan ide aspirasinya. SAPA Online dapat diakses dengan link <https://aspirasi.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> .

c. Manca (Monitoring Anggaran & Capaian Kinerja)

Aplikasi Manca adalah aplikasi berbasis online sebagai wadah penyajian realisasi anggaran, realisasi kinerja, renja, dan renstra dan data-data lain yang ada pada perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Realisasi di input secara berkala per triwulan dan semester oleh masing-masing perangkat daerah, dan diatur oleh Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar.

Dalam melakukan evaluasi keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis, maka digunakan skala pengukuran 5 (lima) kriteria pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≥	Sangat Tinggi
2	76 % s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran kinerja dari Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Penghitungan persentase capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi,

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}^{*)}}{\text{Rencana}^{**)}} \times 100\%$$

B. Analisis Capaian Kinerja Sekretariat DPRD

Penilaian terhadap capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dilandaskan pada Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Dalam perjanjian kinerja berupa indikator kinerja dan target kinerja berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Analisis Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Sekretariat DPRD beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/KODE
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	<u>Indikator:</u> Nilai SAKIP Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Nilai SAKIP dari Inspektorat	Skala Nilai	B (70)	CC (58,50)	82%	Belum mencapai target
	<u>Indikator:</u> Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah <u>Meta Indikator:</u> Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai	100%	Sangat Tinggi

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan	<u>Indikator:</u> Realisasi S.Kegiatan Program Kerja $\times 100\%$ $\frac{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}}{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}}$	%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
	<u>Indikator:</u> Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD <u>Meta Indikator:</u> Hasil Survei oleh Anggota DPRD Kab. Kep. Selayar	Nilai	75	88	117%	Sangat Tinggi

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2024

Adapun analisis capaian kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 : Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah

Realisasi capaian sasaran 1 yakni ***“Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah”***.

a. Indikator pertama yakni Nilai SAKIP Sekretariat DPRD dengan capaian indikator Nilai SAKIP Sekretariat DPRD untuk tahun 2024 berdasarkan Surat Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar No. 016/EV-LAKIP/II/2024/ITDA memperoleh nilai CC (58,50) dengan kategori ***“Cukup Memadai”***. Namun pada tahun ini belum mencapai target yang telah ditetapkan, Adapun beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan, yaitu:

1. Menuangkan Indikator Kinerja Utama dalam dokumen perencanaan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting);
2. Memanfaatkan perencanaan kinerja untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
3. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; sehingga langkah aksi pelaksanaan pengukuran kinerja lebih optimal;
4. Meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan menjadikan pengukuran kinerja sebagai kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
5. Memanfaatkan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishmen, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien;
6. Menyusun dokumen laporan kinerja menggambarkan kualitas atas

pencapaian kinerja, menginformasikan keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan;

7. Memanfaatkan dokumen pelaporan kinerja dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
8. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang diberikan.

Tabel 3.3

**Perbandingan Realisasi Kinerja Nilai SAKIP
Sekretariat DPRD Tahun Sebelumnya dan Periode Akhir Renstra**

Nilai SAKIP Sekretariat DPRD			Keterangan
Tahun	Target	Realisasi	
Tahun 2023	B (65)	B (61,35)	
Tahun 2024	B (70)	CC (58,50)	
Tahun 2025	A (76)	-	

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

- b. Indikator Kedua dengan indikator Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk realisasi tahun. Berikut realisasi sasaran strategis 1 dengan dengan indicator Laporan keuangan yang sesuai SAP .

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Sasaran 1 tahun 2024

SASARAN 1					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Laporan Keuangan yang sesuai SAP	Hasil Penilaian Laporan Keuangan Oleh Inspektorat	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2024

Data capaian ini dapat dilihat dari opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang dinilai oleh BPK.

Sasaran 1 : didukung dengan pencapaian target 2 Program yang terdiri dari 42 Sub Kegiatan. Berikut nilai realisasi dan capaian pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran 1.

Tabel 3.5
Realisasi dan Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Pendukung Sasaran 1

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja	100%	100%	100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	5	5	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	100%
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	12	100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1	100%
Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan	100%	99%	99%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh gaji dan tunjangan	26/bulan	26/bulan	92%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pegujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100%
Pegelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	12	100%
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Dokumen Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	100%

Daerah SKPD				
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	8	100%
Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100%
Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Pegawai Perangkat Daerah	100%	100%	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	29	29	100%
Admnistrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Keterpenuhan Administrasi Umum	100%	100%	100%
Penyediaan Komponen Instalasi / Penerangan Bangunan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20	20	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	40	40	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	36	100%
Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Sarana dan Prasarana Kerja	100%	100%	100%
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17	17	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	6	100%
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Keterpenuhan Jasa Urusan Pemerintahan	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100%
Pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Atau Kendaraan Jabatan	Jumlah Kendaraan PerOrangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	36	36	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	35	100%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	100%

Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	96%	96%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 orang/bulan	25 Orang/bulan	92%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	125	125	100%
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	100%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	12	100%
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2	2	100%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8	8	100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8	8	100%
Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	100%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33	33	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10	10	100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	50	100%
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	100%	100%
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25	25	100%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2024

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran 1 disebabkan oleh:

- a. Sasaran 1 didukung oleh 2 program dan 42 sub kegiatan telah dilaksanakan dengan realisasi dan capaian 100;
- b. Nilai SAKIP SKPD Tahun 2025 dengan kategori kurang atau predikat CC (58,50) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP;
- c. Laporan Keuangan yang sesuai SAP tahun 2024 telah sesuai SAP dan mencapai target.

2. Sasaran 2 : Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan

Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terdiri dari dua Indikator kinerja dengan tolak ukur capaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 3.6
Target dan Realisasi Sasaran 2**

SASARAN 2					
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	Realisasi S.Kegiatan Program Kerja ----- Jumlah S.Kegiatan Program Kerja tepat waktu	100%	100%	100%
	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Hasil survey Kualitas layanan Sekretariat DPRD oleh Anggota DPRD	75	88	117%

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2024

Adapun yang menjadi penjelasan pada setiap indikator yang mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah sebagai berikut.

a. Indikator 1 : Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Data Dukung Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu

Dalam melaksanakan tiga fungsi DPRD yakni, fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dsan Fungsi Pengawasan , DPPD telah menyusun Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, dengan 3 program kerja yakni :

- a. Program Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Program Pengembangan Regulasi Daerah;
- c. Program Peningkatan Kehumasan DPRD.

Ketiga program Kerja DPRD tersebut diatas selanjutnya kami selaraskan / intergrasikan ke dalam program program kerja Sekretariat DPRD yaitu pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD (permendagri 90 tentang tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah) Berikut pengintegrasian dan penyesuaian Program kerja DPRD ke dalam Program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar .

Tabel 3.7

**PENYELARASAN / PENGINTEGRASIAN PROGRAM KERJA DPRD
KE DALAM DOKUMEN PERENCANAAN SEKRETARIAT DPRD TA 2024**

No	Program Kerja DPRD			Program Kerja Sekretariat DPRD		Rencana Kerja /Target/ Tahapan pelaksanaan
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Workshop, Seminar , Lokakarya Pelatihan	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	September 2024 (setelah pemngambilan Sumpah anggota DPRD periode 2024-2029)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Fraksi-fraksi	- Rapat Fraksi, - Penyusunan Pandangan Umum dan Penyiapan Rekomendasi Fraksi	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
				Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)
		Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Anggaran	- Rapat Kerja/Intern Pembahasan KUA PPAS Pokok dan perubahan, - Rapat Kerja/Intern Pembahasan APBD Pokok dan perubahan, - Rapat Koordinasi/ konsultasi	Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS - Pembahasan KUA PPAS Perubahan - Pembahasan APBD - Pembahasan APBD Perubahan	MingguII juli s/d Minggu II Agustus Minggu I s/d minggu II Agustus Minggu II September s/d 31 Desember Minggu II sept s/d 31

		<ul style="list-style-type: none"> - Harmonisasi pokok-pokok pikiran DPRD - Evaluasi APBD/APBD Perubahan 		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD 	<p>oktober</p> <p>Triwulan II</p> <p><i>(Berdasarkan permendagri No. 15 tahun 2023)</i></p>
	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Pengawasan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Kerja / Intern pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan perda dan pergub, pengawasan kebijakan dan pemerintahan daerah , dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai bidang tugas dari komisi-komisi - Melakukan Kunjungan kerja/konsultasi terkait hasil rapat terhadap fungsi pengawasan tersebut 	<p>Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian(Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam(Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja) - Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK - Pengawasan Penggunaan Anggaran - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 	<p>Triwulan I – IV (tentative)</p> <p>Minggu IV Maret – III April (LKPJ diserahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir)</p>

		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Tugas Alat Kelengkapan Dewan (Pimpinan, Bamus, dan badan kehormatan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rapat Komisi (Internal/Kerja) - Rapat Badan Musyawarah - Rapat Badan Kehormatan - Rapat koordinasi konsultasi DPRD - Kunjungan Kerja / koordinasi konsultasi 	<p>Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah - Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD <p>Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan Kode Etik DPRD 	<p>Triwulan I – triwulan IV (tentative sesuai permintaan)</p>
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Kinerja Legislati</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penyiapan pembahasan draft produk hukum inisiatif, - memfasilitasi bapemperda dalam membuat kajian kelayakan sebuah perda untuk dibahas - Penyusunan serta pengelolaan Program Pembentukan Perda. - Pembahasan Rancangan Perda dalam rapat-rapat, hearing dengan 	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah <p>Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 	<p>Triwulan II (sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80 tahun 2015 tentang pemebntukan produk hokum daerah</p> <p>Triwulan II dan III (tentative sesuai permintaan)</p> <p>Tentatif sesuai pembahasan ranperda</p>

			<p>pakar, konsultasi dan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal bamusy dan tata tertib</p>			
3	<p>Program Peningkatan Kehumasan DPRD</p>	<p>Kegiatan : Pemberitaan DPRD</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin Kemitraan dengan stakeholder, media elektronik maupun cetak untuk memberikan informasi yang seimbang kepada masyarakat tentang kinerja dan hasil kerja DPRD 	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p>	<p>Januari s/d Desember</p>
		<p>Kegiatan : Penyelenggaraan Representasi Rakyat dan Partisipasi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan reses - Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke daerah, identifikasi permasalahan ke Kecamatan, pertemuan/ /diskusi dengan Masyarakat terkait di penyampaian aspirasi masyarakat di gedung DPRD 	<p>Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD</p>	<p>Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan - Pelaksanaan Reses - Kunjungan Kerja dalam daerah</p>	<p>Reses I : Jan s/d April Reses II : Mei s/d Agust Reses III : Sept s/d Des</p>

			melalui kegiatan hearing dengar pendapat, penerimaan demonstrasi dan unjuk rasa.			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1

	Program Kerja DPRD	Program Kerja Sekretariat DPRD		Target pelaksanaan	Realisasi	Tkt Capaian	Sumber data
1.	Program : Peningkatan Kinerja Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Program : dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub.Kegiatan : - Orientasi DPRD/ Bimbingan Teknis DPRD/ Pendalaman Tugas DPRD	September 2024	18 s/d 23 September	Tepat waktu	Bag.umum dan Keu
		Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Kegiatan : Layanan Administrasi DPRD Sub Kegiatan : Fasilitasi Fraksi DPRD	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	November-Desember	Tepat Waktu	Bag.umum dan Keu
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Januari s/d Desember (tentative sesuai permintaan)	Januari s/d Desember	Tepat waktu	Bag.Persd.& Perundang-undangan
		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembahasan Kebijakan Anggaran Sub kegiatan : - Pembahasan KUA PPAS	Minggu II juli s/d Minggu II agustus <i>(Permendagri No. 15 tahun 2023)</i>	16 – 17 Juli 2024 14 Agustus 2004	Tepat waktu	Bag.Fasilitasi Pengawasan & Penganggara
			- Pembahasan KUA PPAS Perubahan	Minggu I s/d minggu II Agustus <i>(Permendagri No. 15 tahun 2023)</i>	30 Juli – 2 Agustus 2024	Tepat waktu	

			- Pembahasan APBD	Minggu III September s/d 31 Des <i>(permendagri No. 15 tahun 2023)</i>	23 september 2024 14 s/d 25 Oktober 2024 5 November 24 – 26 Nopember 2024 24 Desember 2024 (Penetapan APBD)	Tepat waktu	
			- Pembahasan APBD Perubahan	Minggu III Agustus <i>(permendagri No. 15 tahun 2023)</i>	12 s/d 14 Agustus 2024	Tepat waktu	
			- Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban APBD	Minggu I – III Juni	Juni	Tepat waktu	

		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Sub Kegiatan - Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu Tepat waktu	Bag. Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam - Pengawasan Urusan (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pengawasan Penggunaan Anggaran (Rapat Intern/Rapat Kerja dan kunjungan kerja)	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Minggu IV Maret – III April	28 Maret – 22 April	Tepat waktu	

		Program : Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	Kegiatan : Fasilitasi Tugas DPRD Sub Kegiatan : - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah	Triwulan I – IV (tentative) Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan 28 Maret 2024 10 Mei 2024 19 Juni 2024 17 September 2024 18 Oktober 2024 4 Nopember 2024 7 Nopember 2024 24 Desember 2024	Tepat waktu Tepat waktu	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran
			- Fasilitasi tugas Pimpinan DPRD	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
			Kegiatan : Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD Sub Kegiatan : -Pengawasan Kode Etik DPRD	Triwulan I – IV (tentative)	Terlaksana sesuai permintaan	Tepat waktu	
2	Program Pengembangan Regulasi Daerah	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan : Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Sub Kegiatan : - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Juni-Desember (sebelum penetapan APBD (permndagri no. 80 tahun	21 Juni 2024 18 Oktober 2024	Tepat waktu	Bag. Persidangan dan perundang-undangan

			<p>2015 tentang pemetukan produk hukum daerah</p> <p>Triwulan II dan IV (tentative)</p> <p>- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p> <p>Kegiatan : Peningkatan kapasitas DPRD Sub Kegiatan : - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli</p>	<p>22 Oktober 2024 24 Desember 2024</p> <p>- Pembahasan ranperda RTRW mulai 26 Pebruari 2024 - 4 April Rapat Persiapan konsultasi - Pansus A : 13 mei 12 Agustus 2024 Pansus B : 13 Mei – 12 agustus Pansus RPJPD : 9 Juli – 12 Agustus 2024</p> <p>Januari s/d Desember menyesuaikan dengan pembahsan perda</p>	<p>Tepat waktu</p> <p>Tepat waktu</p> <p>Tepat waktu</p> <p>Tepat waktu</p>	
3	Program Peningkatan Kehumasan DPRD	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	<p>Kegiatan: Peningkatan Kapasitas DPRD Sub Kegiatan - Publikasi dan Dokumentasi Dewan</p>	<p>Januari s/d Desember</p>	<p>Januari s/d Desember</p> <p>Tepat waktu</p>	<p>Bag.Persd.& Perundang-undangan</p>

		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Kegiatan: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Sub Kegiatan - Pelaksanaan Reses - Kunjungan Kerja dalam daerah	Reses I : Triwulan I Reses II : Triwulan III Januari s/d Desember	Reses I : 15 – 20 Januari Reses II : 24 – 29 September Januari s/d Desember	Tepat waktu Tepat waktu Tepat waktu	Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran

Sumber : Realisasi Program Kerja DPRD permasa sidang (lampiran 1)

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran 2 indikator 1 Per bulan

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Per Bulan												Realisasi Kinerja TA 2024
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
Layanan Administrasi DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Administrasi DPRD	100%	3%	11%	11%	7%	3%	11%	7%	19%	7%	3%	3%	15%	100%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	2										0	1	1	2
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	8		1	1	1	0	0	0	3	0	0	0	2	8
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	8		1	1	0	0	2	1	1	1	0	0	1	8

Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Layanan dalam Pembahasan Perda (%)	100%	0%	3%	0%	4%	27%	20%	5%	12%	0%	20%	0%	10%	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5		0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	5
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	30		2	0	2	16	0	3	7	0	0	0	0	30
Pembahasan kebijakan anggaran	Persentase Rapat Pembahasan yang terselenggara terhadap rapat yang terjadwal	100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	32%	28%	4%	11%	4%	2%	100%
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	10		0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	10
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	10		0	0	0	0	0	8	2	0	0	0	0	10
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	11		0	0	0	0	0	0	0	2	6	2	1	11

Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	11		0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	11
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	10		0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	10
Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan	Rata-Rata Persentase Rapat dan Kunjungan Kerja yang terselesaikan terhadap rapat yang terjadwal	100%	6%	2%	23%	21%	8%	6%	6%	3%	1%	4%	6%	15%	100%	
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	15	3	2	0	2	1	0	0	1	0	1	4	1	15	
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Insfrakstruktur	15	3	0	0	3	3	0	0	1	0	1	3	1	15	
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	15	1	0	0	0	0	0	4	1	1	1	0	7	15	
Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	15		0	0	1	3	4	0	1	0	1	0	5	15	

Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	15		0	0	1	3	3	3	0	0	1	0	4	15
Pengawasan Urusan Pemerintahan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5		0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	5		0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	5		0	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Peningkatan Kapasitas lembaga DPRD	100%	2%	2%	3%	3%	19%	5%	4%	9%	29%	6%	7%	12%	100%
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	25		0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	25

Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	60		0	1	1	13	5	5	5	5	0	5	20	60
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	21		0	0	0	10	1	0	4	0	3	2	1	21
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	60	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Cakupan Layanan dalam penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	100%	36%	0%	0%	3%	5%	2%	0%	1%	28%	7%	9%	10%	100%
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	75	16	0	0	4	7	3	0	1	5	11	13	15	75
Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	50	25	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	50
Pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Cakupan Layanan dalam Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	100%	0%	0%	0%	80%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	0%	100%
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	5		0	0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	5

Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Keterpenuhan Layanan Terhadap Tugas DPRD	100%	3%	17%	6%	6%	16%	9%	10%	4%	3%	8%	11%	7%	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	33	2	8	2	5	1	2	7	2	0	1	3	0	33
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	10		0	1	0	2	1	0	0	1	1	2	2	10
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	50	1	14	1	2	12	5	5	3	0	5	2	0	50

Berdasarkan data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seluruh program kerja DPRD yang telah diintegrasikan ke dalam program kerja Sekretariat DPRD dapat diselesaikan dengan tepat waktu dengan capaian 100 %.

Formulasi pengukurannya adalah sebagai berikut :

$$R : \frac{\text{Realisasi S.Kegiatan Program Kerja}}{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}} \times 100\%$$

$$R : \frac{26}{26} \times 100\%$$

R ; 100%

Tabel 3.10
Jumlah Produk Hukum DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar
Tahun 2019-2024

Sub Elemen	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peraturan Daerah	6	6	6	10	11	11
Peraturan Daerah Istimewa	0	0	0	0	0	0
Peraturan DPRD	1	0	0	0	1	0
Keputusan DPRD	10	10	12	16	15	12
Keputusan Pimpinan DPRD	4	4	5	5	5	5
Program Pembentukan Perda (Propemperda)	10	6	10	10	11	11
Rancangan Perda yang Disetujui DPRD	6	6	6	10	11	11
Rancangan Perda yang Diusulkan DPRD	6	6	6	10	11	11

Dari perhitungan di atas, diperoleh penjelasan terhadap Indikator dua, yakni Persentase Pelaksanaan Program Kerja DPRD Tepat Waktu sebagai berikut.

1. Bahwa semua program kerja DPRD yang telah direncanakan dalam Renja DPRD terlaksana dan direalisasikan tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan . Realisasi dan Capaian indikator Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu diperoleh nilai 100%, keberhasilan ini didukung oleh komitmen dan kerja sama Sekretariat DPRD, Anggota DPRD dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Program Kerja DPRD;
2. Program Pengembangan Regulasi Daerah dengan kegiatan Penyelenggaraan Kinerja Legislasi TA 2024 berupa 11 Peraturan

Daerah yang telah ditetapkan TA 2024, 12 Keputusan DPRD, 5 Keputusan Pimpinan DPRD, 11 Propemperda, 11 Ranperda yang disetujui DPRD.

b. Indikator 2 : Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Data Dukung Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD

Tabel 3.11
Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD

No	Pernyataan	Skala Penilaian Responden 25 Anggota Dewan				
		SP	P	KP	TP	STP
Dukungan Sumber Daya Manusia						
1	Kompetensi dan Profesionalisme PNS dalam memberikan dukungan layanan kepada Dewan	18	7	0	0	0
2	Inisiatif, komunikatif, dan kerjasama PNS dalam memberikan dukungan layanan dewan	18	7	0	0	0
3	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	18	7	0	0	0
4	Kualitas, ketepatan, dan kecepatan menyiapkan materi persidangan	18	7	0	0	0
5	Disiplin Kerja (Mengikuti peraturan, tepat waktu) dan kesediaan bekerja diluar jam kerja	18	7	0	0	0
Pelayanan Alat Kelengkapan						
6	Kecepatan dan ketelitian dalam proses penanganan surat permohonan perjalanan dinas	0	25	0	0	0
7	Kecepatan dan ketelitian dalam proses pembuatan dokumen perjalanan dinas	0	25	0	0	0
8	Keramahan dan sikap akomodatif dalam pelayanan administrasi perjalanan	0	25	0	0	0
9	Penguasaan materi (peraturan terkait perjalanan dinas) dalam penyelesaian permasalahan dinas	0	25	0	0	0
Pelayanan Kesehatan						
10	Komunikasi dan informasi mengenai adanya fasilitas kesehatan dewan	15	10	0	0	0
11	Komunikasi dan informasi hasil pelayanan kesehatan	15	10	0	0	0
Penyediaan Sarana dan Prasarana						
12	Keramahan, Kecepatan dan ketelitian petugas dalam merespon keluhan (dilingkungan gedung DPR)	15	10	0	0	0
13	Kualitas ruang kerja anggota	8	16	1	0	0
14	Kualitas ruang rapat paripurna dan ruang AKD	5	14	6	0	0
15	Kualitas sarana pendukung (toilet, taman, lift, dan alat pendingin)	0	16	8	1	0
Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan						
16	Fasilitas pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD	10	10	5	0	0
17	Publikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat	13	10	2	0	0
18	Fasilitasi tamu-tamu DPRD	15	10	0	0	0

Pelayanan Persidangan dan Risalah						
19	Fasilitasi kegiatan hearing dan reses	15	10	0	0	0
20	Fasilitasi bahan kegiatan rapat paripurna, rapat paripurna istimewa dan koordinasi pelantikan anggota DPRD	15	10	0	0	0
21	Fasilitasi Penyediaan akomodasi (jamuan, tempat, sound system) kegiatan rapat DPRD	15	6	4	0	0
Pelayanan Bagian Perundang-Undangan dan Pengkajian						
22	Fasilitasi bahan rancangan penyusunan naskah akademik dan ranperda prakarda DPRD	0	25	0	0	0
23	Fasilitasi penyediaan tenaga ahli dan staf ahli fraksi DPRD	0	25	0	0	0
24	Kajian dan fasilitas gugatan hukum terhadap DPRD	0	25	0	0	0
Pelayanan Bagian Keuangan						
25	Ketepatan waktu penyampaian gaji dan tunjangan DPRD	23	2	0	0	0
26	Komunikasi dan informasi mengenai hak-hak DPRD	23	2	0	0	0
27	Penyusunan/perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan DPRD	23	2	0	0	0
Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan		300	348	26	1	0

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2025

Keterangan :

- SP : Sangat Puas
- P : Puas
- KP : Kurang Puas
- TP : Tidak Puas
- STP : Sangat Tidak Puas
- Skor Nilai SP : 5
- Skor Nilai P : 4
- Skor Nilai KP : 3
- Skor Nilai TP : 2
- Skor Nilai STP : 1
- **25 Anggota Dewan x 27 Pernyataan : 675 Jawaban**

Tabel 3.12
Perhitungan Penilaian Quisisioner Survey Tingkat Kualitas Layanan
Sekretariat DPRD

Penilaian	Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan	Skor	Total Skor
1	2	3	4 = 2x3
Sangat Puas	300	5	1500
Puas	348	4	1392
Kurang Puas	26	3	78
Tidak Puas	1	2	2

Sangat Tidak Puas	0	1	0
Total	675		2972

Sumber : <http://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/>, diakses pada Januari 2025

Keterangan

Y : Skor Tertinggi x Jumlah Skala Penilaian 25 Anggota Dewan atas 27 Pernyataan

Y : $5 \times 675 = 3.375$

Rumus Tingkat Kualitas Layanan

$$\begin{aligned} \text{Sekretariat DPRD} &: \frac{\text{Total Skor} \times 100}{Y} \\ &: \frac{2.972 \times 100}{3.375} \\ &: 88 \end{aligned}$$

Berikut catatan yang diberikan Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar atas Jawaban Kurang Puas:

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana
 - Kualitas Ruang Kerja DPRD perlu memperhatikan kebersihan secara berkala;
 - Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang AKD perlu memperbaiki AC agar dingin maksimal dan rehab ruangan;
 - Kualitas Sarana Pendukung (Toilet, Taman, Lift, dan Alat Pendingin perlu memperhatikan ketersediaan air dan kebersihan toilet.
- b. Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan
 - Fasilitas Pengaduan Masyarakat Kepada Anggota DPRD telah disediakan namun perlu untuk selalu dilakukan pengecekan dan diadakan sosialisasi website kepada masyarakat
 - Publikasi Kegiatan DPRD kepada masyarakat
 - Tenaga Publikasi harus standby untuk setiap kegiatan Anggota DPRD
 - Perlu ada pendampingan tim publikasi setiap kegiatan dewan seperti rapat terbuka dan kunker
- c. Pelayanan Persidangan dan Risalah
 - Fasilitasi Penyediaan akomodasi (jamuan, sound system) kegiatan rapat DPRD
 - Sound system ruang rapat paripurna perlu diganti yang baru
 - Layanan makan minum terutama kopi/teh sebaiknya gula dipisah tersendiri
 - Jamuan kue dan makanan sebaiknya sesekali variatif
 - Snack : jenisnya dibedakan (kering dan basah), kopi/teh sebaiknya gulanya dipisahkan sehingga dapat diracik sesuai

selera

Dari perhitungan dan penjelasan diatas, diperoleh analisis terhadap Indikator 2 yakni Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat sebagai berikut.

- Realisasi dan Capaian indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD diperoleh nilai 88 dengan persentase capaian dari target adalah 104% yang diperoleh dari hasil survey yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD melalui website <https://www.ik.dprd.kepulauanselayarkab.go.id/> yang dapat diakses oleh 25 Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Responden Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD adalah 25 orang Anggota DPRD Kab. Kep Selayar atas 27 pernyataan sehingga diperoleh total 675 jawaban bervariasi dengan skala penilaian Sangat Puas dengan skor 5, Puas dengan Skor 4, Kurang Puas dengan skor 3, Tidak Puas dengan skor 2, dan Sangat Tidak Puas dengan skor 1. Dari Tabel 3.10 diatas diperoleh angka bahwa dari 25 Anggota DPRD Kab Kep. Selayar dengan 27 pernyataan diperoleh 675 jawaban dengan penilaian yakni 300 jawaban Sangat Puas, 348 Jawaban Puas, 26 Jawaban Kurang Puas dan 1 jawaban Tidak Puas. Adapun yang menjadi faktor Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja indikator pertama sasaran ketiga disebabkan oleh:

Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kulitas layanan sekretarit DPRD) selalu melebihi target setiap tahunnya,

Tabel 3.13

Perbandingan Target dan Realisasi sampai pada akhir periode renstra

SASARAN 2						
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Meta Indikator	2024		2026	
			Target	Realisasi	Target	Tingkat Cap (%)
Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni	Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu	$\frac{\text{Realisasi S.Kegiatan Program Kerja}}{\text{Jumlah S.Kegiatan Program Kerja}} \times 100\%$	100	100	100	100

fungsi pembentukan perda, Fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD	Tingkat Kualitas layanan Sekretariat DPRD terhadap Anggota DPRD	75	88	85	100%
-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	----	----	----	------

Sumber : Data Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kab. Kep Selayar Tahun 2024

Berdasarkan table tersebut diatas kami dapat jelaskan bahwa tingkat capaian kinerja untuk indicator kedua (tingkat kulitas layanan sekretarit DPRD) pada tahun ke tiga periode renstra , sudah mencapai 100%

C. Realisasi Keuangan

Tabel 3.14
Capaian Realisasi Anggaran Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Sisa Anggaran	Persentase
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.085.322.700	16.709.331.899	368.534.301	98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80.599.600	75.438.900	5.160.700	94%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.349.600	21.573.200	776.400	97%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	9.710.000	9.084.000	626.000	94%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	7.480.000	6.893.000	587.000	92%
Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	4.030.000	3.323.000	707.000	82%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	4.030.000	3.228.000	802.000	80%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	18.000.000	17.068.100	931.900	95%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14.269.600	730.400	95%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.364.425.300	2.285.000.202	79.425.098	97%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.254.100.000	2.185.486.052	68.613.948	97%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	38.152.300	35.325.800	2.826.500	93%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	31.138.200	29.268.050	1.870.150	94%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.400.000	5.806.600	2.593.400	69%
Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	16.998.000	15.057.000	1.941.000	89%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.636.800	14.056.700	1.580.100	90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	9.843.100	156.900	98%
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.000.000	2.946.600	53.400	98%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.000.000	1.950.600	49.400	98%

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.000.000	4.945.900	54.100	99%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	383.809.200	383.637.952	171.248	100%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	383.809.200	383.637.952	171.248	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	650.909.300	649.438.600	1.470.700	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.310.000	15.019.800	290.200	98%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.010.300	45.896.000	114.300	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.190.000	40.012.000	178.000	100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	549.399.000	548.510.800	888.200	100%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	287.338.700	263.610.000	16.272.200	92%
Pengadaan Mebel	170.056.500	162.600.000	7.456.500	96%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.282.200	101.010.000	16.272.200	86%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	772.833.000	759.550.312	13.282.688	98%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	9.961.000	39.000	100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	329.610.000	327.680.513	1.929.487	99%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	433.223.000	421.908.799	11.314.201	97%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.138.000	652.553.100	13.584.900	98%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	183.264.000	178.146.400	5.117.600	97%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.652.000	107.630.000	8.022.000	93%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.310.000	27.032.000	278.000	99%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	339.912.000	339.744.700	167.300	100%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	11.114.953.300	10.934.137.433	180.815.867	98%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	9.950.957.100	9.875.898.433	75.058.667	99%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1.163.996.200	1.058.239.000	105.757.200	91%
Layanan Administrasi DPRD	754.316.300	696.122.300	58.194.000	92%
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	72.045.800	71.280.000	765.800	99%
Fasilitasi Fraksi DPRD	5.025.000	4.995.000	30.000	99%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	11.245.500	10.811.800	433.700	96%
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	666.000.000	609.035.500	56.964.500	91%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD	12.681.103.300	12.588.186.268	92.917.032	99%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.535.657.000	2.534.419.158	1.237.842	100%
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	122.155.000	121.924.200	230.800	100%
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.413.502.000	2.412.494.958	1.007.042	100%
Pembahasan Kebijakan Anggaran	677.993.000	667.320.100	10.672.900	98%
Pembahasan KUA dan PPAS	25.000.300	23.970.000	1.030.300	96%
Pembahasan Perubahan KUA dan	14.986.200	14.816.700	169.500	99%

Perubahan PPAS				
Pembahasan APBD	248.256.800	244.839.900	3.416.900	99%
Pembahasan APBD Perubahan	208.624.200	204.664.400	3.959.800	98%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	181.125.500	179.029.100	2.096.400	99%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	553.231.400	537.929.000	15.302.400	97%
Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	140.145.700	137.631.100	2.514.600	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	166.095.400	163.861.000	2.234.400	99%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	66.550.600	62.965.500	3.585.100	95%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	58.351.700	57.226.200	1.125.500	98%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	74.998.900	73.511.200	1.487.700	98%
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	32.309.100	32.108.800	200.300	99%
Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.680.000		2.680.000	0%
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	12.100.000	10.625.200	1.474.800	88%
Peningkatan Kapasitas DPRD	1.036.512.500	998.360.735	38.151.765	96%
Orientasi DPRD	589.512.500	587.860.735	1.651.765	100%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	217.500.000	217.500.000	0	100%
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	49.500.000	44.500.000	5.000.000	90%
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	180.000.000	148.500.000	31.500.000	83%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.657.050.000	1.644.568.900	12.481.100	99%
Kunjungan Kerja dalam Daerah	222.000.000	209.568.900	12.431.100	94%
Pelaksanaan Reses	1.435.050.000	1.435.000.000	50.000	100%
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	81.588.000	73.362.400	8.225.600	90%
Pengawasan Kode Etik DPRD	81.588.000	73.362.400	8.225.600	90%
Fasilitasi Tugas DPRD	6.139.071.400	6.132.225.975	6.845.425	100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4.224.970.100	4.222.479.675	2.490.425	100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	194.779.000	191.437.700	3.341.300	98%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.719.322.300	1.718.308.600	1.013.700	100%
TOTAL ANGGARAN	29.766.426.000	29.297.518.167	461.451.333	98%

Sumber : RFK Desember 2024

Realisasi anggaran T.A. 2024 cukup tinggi yakni 98% dengan perolehan realisasi sub kegiatan masing-masing rata-rata mencapai 99% dengan kinerja 100%

BAB IV

PENUTUP

Hasil laporan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sekretariat DPRD Kab. Kepulauan Selayar tahun 2024 memiliki 2 sasaran strategis yaitu:
 - a. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dengan dua Indikator yakni indikator nilai SAKIP Sekretariat DPRD Tahun 2024 yakni predikat CC (58,50) dengan rekomendasi yang telah dijabarkan di atas, menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan upaya memenuhi rekomendasi yang tertuang dalam LHE SAKIP, indikator kedua yakni Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah telah sesuai SAP dan mencapai target;
 - b. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yakni fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan dua indikator yakni Persentase pelaksanaan program kerja DPRD tepat waktu memperoleh realisasi 100% telah memenuhi target dengan kriteria realisasi sangat tinggi dan menghasilkan 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan T.A. 2024. Indikator Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD terhadap layanan Sekretariat telah memenuhi target dengan nilai 88 dengan persentase capaian 117% dengan kategori sangat tinggi,
2. Realisasi anggaran sebesar Rp 29.297.518.167 atau 98%, dengan sisa anggaran sebesar Rp. 461.451.333 atau 2%.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja antara lain :

- a. Intensif dalam melakukan penyesuaian terhadap peraturan terbaru terkait pelayanan kepada Anggota DPRD dan menjalin komunikasi yang baik dengan Anggota DPRD;
- b. Penyediaan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan formasi bidang tugas yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap DPRD;
- c. Penyediaan anggaran yang memadai secara bertahap untuk dapat mengakomodir masukan Anggota DPRD dari Survey Tingkat Kualitas Layanan Sekretariat DPRD dan LHE SAKIP.